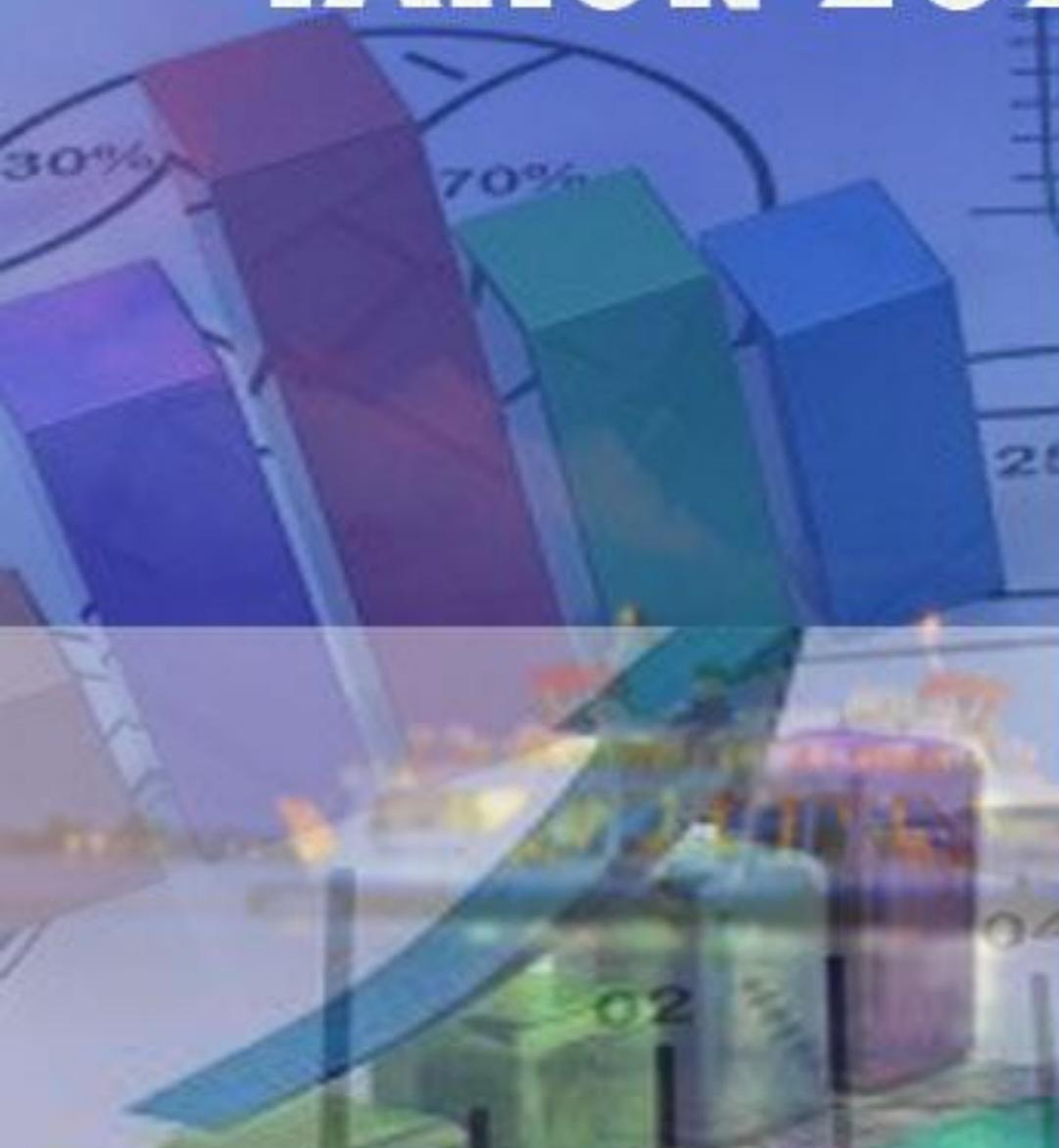




Pemerintah Kota Pontianak
Dinas Kesehatan

RENCANA KERJA TAHUN 2024





KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 173 / D-KES / TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Tahunan Kota Pontianak, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rencana Kerja yang dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang perlu diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 119);
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
PONTIANAK TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- f. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- g. Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan
- h. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024

Pasal 4

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK



SAPTIKO

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat rencana kerja Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta dalam memberikan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajian data dan narasi dalam dokumen ini.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran riil rencana pembangunan kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2024, serta menjadi masukan bagi semua pihak terkait agar dapat direalisasikan sesuai rencana. Akhir kata semoga dapat menjadi sumbangsih dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pontianak.

Wa'alaikumsalaam Warahmatullaah Wabarakaatuh

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak



dr. Saptiko, M.Med.PH
NIP. 19661113 1996030 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN	
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN	i
.....	
DAFTAR	ii
ISI.....	
DAFTAR	iii
TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	II-28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja	IV-1
4.2 Pendanaan	IV-26
BAB V	
PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	II-6
2.2 Realisasi Capaian SPM Tahun 2022	II-18
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022	II-26
2.4 Formulasi Isu-isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022.....	II-31
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	II-34
2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-46
3.1 Tujuan, Sasaran beserta Indikator Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026	III-3
3.2 Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021-2024	III-4
3.3 Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2021-2024	III-7
4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan diartikan sebagai proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan terhadap pilihan-pilihan dan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang (Conyers & Hills, 1994 *cit* Haryanto, 2008). Perencanaan juga dimaknai sebagai proses untuk menentukan tindakan yang berorientasi pada masa depan dengan melalui serangkaian pilihan-pilihan (Faludi, 1973). Menurut Peter Hall (1992), Perencanaan adalah penyusunan rangkaian tindakan secara berurutan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam konteks Perencanaan perangkat daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan diartikan sebagai proses perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode satu tahun, yang mencakup kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan dokumen resmi Dinas Kesehatan yang memuat program, dan kegiatan pada pelayanan Dinas Kesehatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Dokumen Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sampai pada sub kegiatan perangkat daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan terkait langsung dengan pelayanan publik pada masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dimulai dengan persiapan dan pengumpulan data, informasi, menganalisa data dan gambaran pelayanan pada Dinas Kesehatan untuk mengerucutkannya pada penentuan isu-isu penting bidang kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, hingga menghasilkan perumusan tujuan dan sasaran yang juga didasarkan pada review hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Strategis lima tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja juga merupakan rumusan yang didasarkan pada usulan kegiatan prioritas masyarakat yang diperoleh melalui proses musyawarah rencana pembangunan masyarakat (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, maka

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 juga mengacu pada Dokumen RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD dan Tahun 2024.

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
- c. Penyusunan Rencana Kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
- d. Rumusan program / kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif.
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana tahun 2024.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki hubungan keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan RPD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPB.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

- Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 119).
 25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
 26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
 27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 adalah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan Dokumen Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pontianak serta dengan Dokumen Perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kesehatan dapat berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Tahun lalu

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

BAB V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan misi pertama Pemerintah Kota Pontianak adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Dengan tujuan Dinas Kesehatan adalah meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuannya adalah pada Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting.

Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”,

Berikut realisasi 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Dinas Kesehatan, yaitu :

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu sebesar 48,50 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), adapun realisasi capaian Indikator Utama AKI di tahun 2022 adalah 61,47 per 100.000 KH, masih lebih tinggi daripada target maksimal yang ditetapkan dalam menekan angka kematian ibu. Namun, jika dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya (2021) yakni sebesar 53,30 per 100.000 KH, dapat diinterpretasikan tidak terjadi peningkatan dalam angka kematian ibu. Adapun jumlah kematian ibu di tahun 2021 sebanyak 18 (Delapan belas) Kasus Kematian ibu, 12 kasus diantaranya disebabkan oleh Covid-19, sedangkan di tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Adapun sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Sasaran Angka Kematian Ibu, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

2) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Angka Kematian Bayi di Tahun 2022 adalah 2,11 per 1000 KH, angka realisasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target maksimal kematian bayi yang ditetapkan 2,25 per 1000 KH. Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2021 sebesar 1,87 per 1000 KH dapat disimpulkan terjadi peningkatan kinerja dalam kasus kematian bayi di Kota Pontianak. Angka kematian bayi di tahun 2022 sejumlah 24 orang, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sebanyak 21 orang, artinya terjadi penambahan Angka kematian bayi sebanyak 3 orang.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Capaian Indikator Utama penurunan Angka Kematian Bayi, adalah:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Sub. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Kebidanan.

3) Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Upaya peningkatan pelayanan pada orang terduga TBC sesuai standar pelayanan minimal ditetapkan sebesar 100%. Untuk Tahun 2022 capaian pelayanan untuk pasien terduga TBC mencapai 87,31 %. Meskipun angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana angka cakupan sebesar 62,07%, dapat disimpulkan terjadi peningkatan kinerja dalam cakupan pelayanan orang terduga TBC di Kota Pontianak.

Adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung target capaian ini adalah :

- a. Sub kegiatan pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

4) Insiden Rate HIV

Upaya menurunkan angka kesakitan penderita HIV di Kota Pontianak telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun target indikator yang digunakan dalam upaya penurunan penderita HIV adalah Insiden Rate. Insiden rate adalah jumlah rata – rata kasus baru suatu penyakit. Target indikatornya di tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya 2021 yakni 0,0190%. Adapun capaian realisasi indikator Insiden Rate HIV di tahun 2022 adalah 0,014%, Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan cakupan 0,013%, maka dapat diinterpretasikan bahwa terjadi peningkatan upaya cakupan indikator Insiden Rate HIV di tahun 2022.

Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Insiden rate HIV adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Sub Kegiatan tersebut, selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada bidang terkait juga dibantu oleh unit Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA);

b. Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

5) Insiden Rate DBD

Tahun 2022, Angka kesakitan rata-rata penderita DBD di Kota Pontianak sebesar 5,53 per 1000 Penduduk, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2,38 per 1000 penduduk. Adapun target maksimal kejadian Incidence Rate DBD adalah <49 per 100.000 penduduk, artinya angka kesakitan DBD 5,53% di tahun 2022 masih berada di bawah target ambang batas sasaran per 100.000 penduduk dimana jumlah sasaran DBD di Kota Pontianak adalah 668,935 penduduk, secara kumulatif diketahui jumlah penderita DBD di Tahun 2022 adalah 37 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 16 orang.

Adapun Sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Utama upaya penurunan Kesakitan Penderita DBD adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PSN).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

6) Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak

Upaya penanganan penderita Hipertensi di Kota Pontianak ditetapkan dengan target sebesar 27%. Adapun realisasi capaian upaya pencegahan prevalensi penderita Hipertensi di tahun 2022 adalah 10,94%, masih berada dibawah target maksimal yang ditetapkan. Untuk data penderita Hipertensi yang tersedia berdasarkan dari laporan fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Pontianak sebesar 55,202 orang dari jumlah sasaran penderita sebesar 505,444 penduduk. Adapun sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penurunan prevalensi penderita hipertensi adalah :

- a. Sub Kegiatan Pelayanan penyakit menular dan tidak menular;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- c. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan;
- d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

7) Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di Kota Pontianak

Upaya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam pengendalian Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus ditargetkan sebesar 2,40%. Untuk capaian kinerja kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar 1,57% dengan jumlah penderita Diabetes yang berhasil di deteksi adalah sebanyak 7,898 orang. Data penderita Diabetes Mellitus diperoleh berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Pontianak sebanyak 7.898 orang dari jumlah sasaran penderita sebesar 504.444 penduduk. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan prevalensi Diabetes Mellitus adalah melalui sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- d. Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan

8) Angka Wasting Balita

Angka Wasting Balita adalah perbandingan berat badan balita

dengan tinggi badan (BB/TB). Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Angka Wasting Balita di tahun 2022 adalah 7,75% dari target yang ditetapkan 7,50%. Berdasarkan jumlah Balita wasting di tahun 2022 sebanyak 517 balita dari jumlah sasaran 6,670, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 346 Balita maka dapat diinterpretasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja dalam upaya menemukan kasus wasting balita di Kota Pontianak. Berikut Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target penurunan Angka Wasting Balita di Kota Pontianak adalah :

- a. Sub Kegiatan Upaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Bayi Baru Lahir;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Ibu Hamil.

9) Angka Underweight Balita

Angka Underweight Balita adalah jumlah balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan hasil PSG di satu wilayah kerja dibagi jumlah seluruh sampel balita dalam survey PSG di satu wilayah kerja tersebut di kali 100%. Target Indikator Kinerja Angka Underweight Balita Tahun 2022 adalah 12,00%. Realisasi Kinerja dalam pencapaian Indikator Angka Underweight Balita di Kota Pontianak adalah 14,74%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya 9,61% maka terjadi peningkatan persentase jumlah Balita underweight, yang dapat diinterpretasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja berupa meningkatnya temuan jumlah kasus balita underweight di Kota Pontianak berdasarkan hasil kegiatan survey PSG (Penilaian Status Gizi). Adapun Sub kegiatan untuk menunjang upaya penurunan Angka Underweight Balita adalah :

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

10) Angka Stunting Balita

Angka Stunting Balita adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak balita, yaitu tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya.

Realisasi capaian kinerja Angka Stunting Balita di Tahun 2022 sebesar 15,77%, lebih rendah dari target yang ditetapkan Kota Pontianak sebesar 17%, sehingga dapat di

interpretasikan bahwa upaya penurunan kasus Balita stunting dikatakan berhasil. Adapun angka riil temuan jumlah kasus Balita Stunting juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 826 kasus, menjadi 1052 kasus di Tahun 2022, yang berarti bahwa kinerja dalam menemukan Balita stunting semakin meningkat signifikan melalui survey pemantauan status gizi. Adapun Sub Kegiatan yang menunjang upaya penurunan Angka stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Balita adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan 1 Tahun 2023
Kota Pontianak

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinkes) Tahun 2021-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Dinkes) Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1																	
1	2																
1	2	1		80	%	80	%	80	%	100	%	125.00	80.00	%	87	%	21.67
1	02	01	201	40	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100.00	40.00	Dokumen	20	Dokumen	5.00

					Kinerja Perangkat Daerah														
1	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %	48.00	Bulan	24	Bulan	6.00
1	0	0	20	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	Bulan	9	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100.00 %	48.00	Bulan	23	Laporan	5.75
1	0	0	20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	Bulan	12		12	Kali	12		100.00 %	48.00	Bulan	24	Bulan	6.00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Unit	13		24	Unit	24		100.00 %	24.00	Unit	20	Unit	5.08
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	Bulan	12		12	Bulan	12		100.00 %	48.00	Bulan	24	Laporan	6.00

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	192	Unit	100		48	Unit	48	Unit	100.00 %	192. 00	Unit	113	Unit	28.33
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT		100	%	100	%	90	%	10 0	%	111.11 %	100. 00	%	100	%	25.00
					1. Persentase Puskesmas yang menyelenggar akan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir	100	%	100	%	90	%	10 0	%	111.11 %	100. 00	%	100	%	25.00
					2. Persentase Puskesmas yang menyelenggar akan kesehatan Balita	100	%	100	%	95	%	10 0	%	105.26 %	100. 00	%	100	%	25.00
					3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan usia anak	100	%	100	%	95	%	10 0	%	105.26 %	100. 00	%	100	%	25.00

					sekolah dan remaja													
					4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	100	%	100	%	90	%	100	111.11 %	100.00	%	100	%	25.00
					5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (yankes)	100	%	100	%	100	%	100	100.00 %	100.00	%	100	%	25.00
					6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100	%	100	%	100	%	100	100.00 %	100.00	%	100	%	25.00
1	2	2	2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar	100 %	%	100	%	100	%	100	100.00 %	1.00	%	67	%	16.75
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat, BMHP dan Alkes sesuai standar	100 %	%	100	%	100	%	100	100.00 %	1.00	%	67	Unit	16.75
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan		100	%	-					100.00	%	33	%	8.33	

				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a														
				Akreditasi Fasilitas Kesehatan	100	%	50	%	100	Utama/Paripurna=6 Pusk	-	Utama/Paripurna=6 Pusk	0.00%	100.00	%	50	%	12.50
				Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	%	94	%	100	%	97	%	96.77%	100.00	%	97	%	24.23
				Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Ibu Bersalin	100	%	93	%	100	%	96	%	95.73%	100.00	%	96	%	24.06
				Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir	100	%	92	%	100	%	95	%	95.38%	100.00	%	96	%	23.95
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	83	%	100	%	84	%	84.02%	100.00	%	89	/1000 Penduduk	22.25
				Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100	%	36	%	100	%	67	%	66.75%	100.00	%	68	%	16.90

					kesehatan sesuai standar														
					Persentase orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	30	%	100	%	72	%	71.61 %	100. 00	%	67	%	16.80
					Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	57	%	100	%	62	%	62.35 %	100. 00	%	73	%	18.28
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	21	%	100	%	33	%	33.34 %	100. 00	%	51	%	12.86
					Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	38	%	100	%	58	%	57.99 %	100. 00	%	65	Hari	16.33
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan	100	%	58	%	100	%	66	%	66.31 %	100. 00	%	75	Orang	18.69

					keehatan Jiwa sesuai standar														
					Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	%	62	%	100	%	87	%	87.31 %	100.00	%	83	Orang	20.78
					Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	99	%	100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100	Orang	24.92
					Persentase Anak Usia 0- 11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	95	%	59	%	94.1	%	78	%	82.56 %	95.00	%	77	Orang	19.31
					Persentase Jamaah Calon Haji yang terdeteksi faktor risiko kesehatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100	Orang	25.00
					Persentase penanggulang an KLB yang direspon <24 Jam	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100	Orang	25.00

					Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	2	/1000 Penduduk	3	/1000 Penduduk	2	/1000 Penduduk	3	/1000 Penduduk	150.00 %	2.00	/1000 Penduduk	3	Orang	0.67
					Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100	%	92	%	100	%	92	%	92.00 %	100.00	%	95	Orang	23.67
					Persentase Masyarakat Miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh Jaminan Kesehatan	100	%	75	%	100	%	141	%	141.00 %	100.00	%	105	Orang	26.33
					Persentase Pemeriksaan Crosscek Slide TBC	100	%	7	%	100	%	90	%	90.24 %	100.00	%	66	Orang	16.47
1	2	2	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80 %	%	114		80	%	100	%	125.00 %	0.80	%	72		17.90
1	2	2	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	%	100		100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100	%	25.00

1	2	3		PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2.3	/1000 Pendud uk	4.3 5	/1000 Pendud uk	2,3/10 00	penduduk	5	/1000 Penduduk		2.30	/1000 Pendud uk	4	/1000 Penduduk	0.95
					Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	%	100	%	90	%	10 0	%	111.11 %	90.0 0	%	97	%	24.17
1	2	3	2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a	Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	-		100	%	64	%	64.00 %	100. 00	%	55		13.67
1	2	3	2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	100		100	%	10 0	%	100.00 %	100. 00	%	100		25.00
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman	90	%	100	%	90	%	90	%	100.00 %	90.0 0	%	93		23.33

				MAKANAN MINUMAN	sesuai standar														
1	2	4	2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	90	%	100		85	%	100	%	117.65 %	90.0 0	%	97		24.17
1	2	4	2.0 2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki ijin operasional	100	%	100		100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100		25.00
1	2	4	2.0 3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk	100	%	100		100	%	100	%	100.00 %	100.00	%	100		25.00

				Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	memiliki ijin operasional														
1	2	4	2.0 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	90 %	%	100		85	%	59	%	69.41 %	0.90	%	53		13.33
1	2	4	2.0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100 %	%	100		100	%	10 0	%	100.00 %	1.00	%	67		16.75
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	%	100	%	90	%	10 0	%	111.11 %	90.0 0	%	97		24.17

1	2	5	2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaa n, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	49	%	100	%	10 0	%	100.00 %	100. 00	%	83	%	20.75
						92.0 0	%	96. 00	%	96.00	%	98	%	102.08 %	92.0 0	%	95	%	23.83

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	INDIKATOR	Target Dalam Tahun	Sasaran	Jumlah Absolut	%
			Dalam Tahun		
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00	12.527.00	12.122.00	96.77
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.00	11.958.00	11.447.00	95.73
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00	11.388.00	10.862.00	95.38
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.00	45.496.00	38.225.00	84.02
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	96.730.00	64.568.00	66.75
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Persentase orang usia 15-59 tahun menamatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	438.251.00	313.820.00	71.61

7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	66.193.00	41.270.00	62.35
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	165.559.00	55.202.00	33.34
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	13.620.00	7.898.00	57.99
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	1.407.00	933.00	66.31
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00	10.319.00	9.010.00	87.31
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS=HIV)				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00	15.467.00	15.467.00	100.00

Sumber : Data Capaian Akhir SPM Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan dari Tabel diatas maka dapat dijelaskan, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022 sebesar 96,77% dari target 100%, dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya terkait Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dilakukan dengan memenuhi kriteria 10 T, diantaranya :

- a) Penimbangan berat badan;
- b) Pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara teratur;
- c) Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
- d) Pengukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri) yang dilakukan secara teratur;
- e) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung jani (DJJ);
- f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (Td);
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h) Tes Laboratorium mencakup: Tes kehamilan, Pemeriksaan Hb, Pemeriksaan Golongan Darah dan Gluko-Protein urin dilakukan atas indikasi yang diperlukan;
- i) Tatalaksana/penanganan kasus dilakukan sesuai dengan kewenangan pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4 (rujukan penanganan kasus komplikasi dalam kehamilan);
- j) Temu wicara (konseling) dilakukan mengacu pada buku pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu pada kunjungan ke 1, 2, 3 dan 4.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Realisasi capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022 sebesar 95,73% dari target 100%, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, dan di simpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar merupakan pertolongan persalinan baik normal maupun komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta, yang berupa :

- a. Persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- b. Persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Adapun realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Tahun 2022 sebesar 95,38% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak

memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial yang terdiri dari:

- a. Perawatan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) dan;
- b. Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Dilakukan minimal 3 kali sesuai dengan periode Kunjungan Neonatal (KN) yaitu: KN1 (6 - 48 jam), KN2 (3 - 7 hari) dan KN3 (8 - 28 hari).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Realisasi capaian kinerja untuk Pelayanan Kesehatan Balita tahun 2022 yaitu sebesar 84,02% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan.

Jenis Pelayanan Kesehatan Balita, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan
- b. Pelayanan Kesehatan balita 12-23 bulan
- c. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, realisasi capaian kineja tahun 2022 sebesar 66,75%, meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 36,33% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar adalah skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala) yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar setingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 sebanyak 1 kali setiap tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan status gizi
- b. Pemeriksaan tanda-tanda vital
- c. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- d. Pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (15-59 Tahun) di Tahun 2022 adalah sebesar 71,61%, juga meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 29,71% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak wajib

memberikan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
- b. Pengukuran tekanan darah.
- c. Pemeriksaan gula darah.
- d. Anamnesa perilaku berisiko.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 62,35% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang sesuai standar adalah skrining kesehatan yang dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun, terdiri dari:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Realisasi Capaian di Tahun 2021 sebesar 33,34% dari target 100%.

Adapun Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi;
- Pelayanan kesehatan hipertensi diberikan kepada penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di FKTP.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2022 sebesar 57,99%, meningkat dari tahun sebelumnya 37,84% dengan angka target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Adapun Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 66,31% dari target 100%. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah Kota Pontianak dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi.

Mekanisme Pelayanan meliputi :

- a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat;
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
- c. Pemeriksaan status mental
- d. Wawancara
- e. Edukasi kepatuhan minum obat;
- f. Melakukan rujukan jika diperlukan.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Realisasi capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2022 sebesar 87.31% dari target 100% yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada pasien terduga TBC diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar meliputi :

- a. Pemeriksaan klinis
- b. Pemeriksaan penunjang
- c. Edukasi

Adapun Mekanisme Pelayanan :

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;
- c. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/ atau bakteriologis dan/atau radiologis;
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)

Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi Capaian Kinerja ini di Tahun 2022 yaitu sebesar 100% dari target 100%. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi virus HIV meliputi : pemberian komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, pelumas (pelumas), alat suntik steril, dll), pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke pelayanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV adalah :

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur

apapun orientasi seksnya

(heteroseksual, homoseksual atau biseksual);

- f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
- g. Pengguna NAPZA suntik (Penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkoba dan atau zat adiktif suntik lainnya;
- h. Warga binaan pemasyarakatan, yaitu orang yang dalam pembinaan masyarakat Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja			Proyeksi	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	√		100%	100%	100%	100%	90,12%	93,81%	97%	100%	100%
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	√		100%	100%	100%	100%	91,90%	92,57%	96%	100%	100%
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√		100%	100%	100%	100%	91,69%	92,25%	95%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	69,70%	83,15%	84%	100%	100%
5	Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	47,54%	36,33%	67%	100%	100%
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	36,60%	29,71%	72%	100%	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	51,82%	56,91%	62%	100%	100%
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	25,38%	20,72%	33%	100%	100%

9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	42,35%	37,84%	58%	100%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	67,10%	58,06%	66%	100%	100%
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	46,09%	62,07%	87%	100%	100%
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100%	100%	100%	100%	87,43%	99,47%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

Pada tabel 2.3 diatas dapat di interpretasikan bahwa terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja pada beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak, diantaranya pada persentase cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dari capaian pada tahun 2022 sebesar 90,12% meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir hingga mencapai 97% pada tahun 2022 dari target maksimal 100%. Demikian pula pada beberapa indikator SPM lainnya baik Cakupan pelayanan Ibu bersalin, cakupan pelayanan bayi baru lahir dan balitas meningkat signifikan sejak tahun 2020.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

1. Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan

Pasca pencabutan status PPKM Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember 2022 yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022, berbagai penyesuaian-penyesuaian dalam aspek Kesehatan, baik secara personal dalam perilaku hidup sehat, maupun dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan Kesehatan juga dilakukan secara bertahap. Perencanaan program Kesehatan dan kegiatan yang sebelumnya dibatasi oleh kebijakan PPKM, perlahan diakomodir dengan tetap mengedepankan aspek preventif terhadap potensi terjadinya penyakit. Berbagai perubahan dalam bidang Kesehatan, secara langsung turut berimplikasi pada perubahan dari aspek sosial maupun ekonomi yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi dan masa mendatang.

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan maupun program kegiatan yang berdampak pada kinerja pelayanan secara menyeluruh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak tetap melakukan koordinasi dan sinergisitas program kegiatan dengan Perangkat Daerah lain yang terkait serta Unit Pelayanan Teknis yang berada di bawah Dinas Kesehatan berikut masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kesehatan dan kader kesehatan, agar capaian kinerja dapat terealisasi dengan maksimal.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fasilitas Kesehatan yang berada di bawah wilayah binaan Kota Pontianak baik yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan yang diberikan di beberapa Fasilitas Kesehatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan maupun kerjasama dalam pelaksanaan rujukan pelayanan Kesehatan. Untuk tahun 2023, Dinas Kesehatan melakukan kerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dalam pelaksanaan Kegiatan Screening Hypotiroid Kongenital (SHK) pada 6,225 Balita se-Kota Pontianak, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium RSUD Dr. Sardjito.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tetap mengedepankan kualitas layanan serta penegakan protokol kesehatan yang disiplin. Meskipun Pandemi Covid-19 telah ditetapkan berakhir, namun pembiayaan kesehatan pasca pandemic Covid-19 tetap memerlukan strategi dalam perencanaan agar dapat Cost Effective dan Cost Efficiency. Pada masa pandemic, kekurangan Bahan habis pakai, obat-obatan, alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya telah berdampak terhadap pencapaian realisasi capaian kinerja pada Dinas Kesehatan di tahun 2022.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Tugas Fungsi di masa pasca Pandemi Covid-19 adalah tetap dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang ada. Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan di masa Pasca Pandemi Covid-19 antara lain :

- a. Multitasking yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Selain melakukan penyesuaian-penyesuaian pasca pandemi covid-19 Dinas Kesehatan juga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Nonfisik dengan rincian kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat yang juga memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan derajat masyarakat terutama pada masa peralihan new normal pasca pandemi;
- b. Kebijakan program dan pembiayaan Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- c. Keterbatasan sediaan BHP medis dan obat-obatan masih menjadi kendala, terlebih pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan RI tidak mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk Penyediaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai.

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. Perubahan sistem penganggaran keuangan dari SIMAKDA ke SIPD;
- b. Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Aplikasi, baik aplikasi dari Pusat maupun Aplikasi yang di Kelola Daerah;
- c. Terjadinya transisi penggunaan aplikasi dari SIPD lama ke SIPD-RI yang baru berdasarkan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam operasionalnya;
- d. Masih terjadinya penolakan Vaksinasi Covid-19 oleh sebagian kelompok masyarakat;
- e. Sistem pengadaan Barang Jasa untuk pagu di bawah kurang dari 200 juta melalui elektronik pengadaan yang memerlukan waktu;
- f. Perubahan sistem pengadaan Barang Jasa untuk penyediaan makan dan minum yang harus dilaksanakan melalui mekanisme E-Katalog, berpotensi Inefisiensi waktu dan sumber daya;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Terkait dengan dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, secara umum masih bisa kendalikan dengan

baik dan terkait dengan beberapa program yang menjadi sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu yang berhubungan dengan Angka Harapan Hidup dan Angka Stunting di Kota Pontianak masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), bahwa Angka Stunting Tahun 2022 di Kota Pontianak sebesar 19,7 % dari target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 17%. Berdasarkan survei tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak hampir mendekati target capaian yang ditetapkan jika dibandingkan dengan hasil survei status Gizi di Kota Pontianak.

4. Tantangan dan peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masa transisi pasca Pandemi Covid-19, antara lain :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan yang harus senantiasa perlu ditingkatkan baik pada Fasilitas Kesehatan Primer (Puskesmas) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit);
2. Asimetri dan interpretasi yang beragam di masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan pasca pandemic covid-19, aplikasi masa new normal dan banyaknya benturan informasi yang berbeda dan tidak jelas. Adapun faktor penguat sekaligus potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a) Masih tersedianya Bantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang dapat mensupport dalam penyediaan anggaran bagi pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b) Kebijakan program UKM dari Kementerian Kesehatan yang mengakomodir pelaksanaan new normal dan masa transisi berakhirnya pandemic covid-19.
 - c) Kerjasama Lintas program, dan lintas sektor antar perangkat daerah serta Stakeholder lain yang diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi dalam peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun Formulasi isu-isu penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun 2022, dapat kami sampaikan pada Tabel 2.4, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Formulasi Isu – Isu Penting Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5
1	Kesehatan ibu, anak, dan reproduksi	Masih adanya kematian ibu maternal dan kematian Bayi	1) Belum optimalnya sistem rujukan dari FKTP dan FKRTL	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat
			2) Kompetensi sumber daya manusia kesehatan masih kurang dalam mendeteksi faktor resiko serta penanganan kegawatdaruratan ibu maternal	
			3) Faktor sosial budaya masyarakat yang masih mencari pertolongan kelahiran dengan tenaga non kesehatan dan pemberian imunisasi pada bayi.	
2	Adanya kenaikan prevalensi masalah gizi balita (underweight/berat badan kurang dan wasting/gizi kurang)	1) Kurang adekuat asupan makanan pendamping ASI pada balita di atas usia 6 bulan 2) Belum optimalnya pemantauan pertumbuhan perkembangan balita	Masih banyak orang tua yang tidak paham cara pemberian makan bayi dan anak yang benar sesuai kebutuhan anak	
			1) Masih rendahnya peran serta orang tua / pengasuh balita membawa balita ke Posyandu dan fasilitas kesehatan untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak 2) Masih ada petugas kesehatan belum terlatih untuk pemantauan tumbuh kembang balita sesuai standar	
			3) Masih kurang kepatuhan petugas kesehatan dalam pencatatan hasil pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil	
3	Adanya kenaikan jumlah kasus ibu hamil dengan masalah gizi Kurang Energi Kalori (KEK), Anemia)	Asupan makan ibu hamil kurang baik kualitas maupun kuantitasnya	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil akan pentingnya nutrisi saat hamil	

4	Penyakit Menular	Masih ditemukannya Kasus Penyakit Menular (Demam Berdarah, Diare, ISPA, HIV, TBC, PD3I, dan Hepatitis B Pada ibu hamil) dan penyakit berpotensi wabah (penyakit infeksi emerging/re emerging seperti : covid-19, MersCov, Flu Burung, Monkey Fox, dll).	1) Sanitasi yang tidak sehat dan PHBS dimasyarakat masih rendah	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			2) masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan masih ada perilaku beresiko tinggi.	
			3) Sarana Prasarana pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini dan menegakkan diagnosa	
			4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung Program pencegahan penyakit menular	
5	Penyakit Tidak Menular	Kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan masih rendah	1) Masih rendahnya masyarakat dalam upaya melakukan kegiatan untuk mengurangi faktor resiko penyakit tidak menular	
			2) Sarana Prasarana pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini dan menegakkan diagnosa	
6	Kurang budaya Gerakan Masyarakat hidup sehat	Belum optimalnya deteksi dini kesehatan dikelompok masyarakat dan tempat kerja	1) Keterbatasan SDM pemberi layanan kesehatan	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
			2) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan rendah, khususnya untuk melakukan skrining secara mandiri	
			4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang asupan gizi seimbang.	
7	Kurang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung Program kesehatan.	1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	
			2) Masih kurangnya dukungan dari lintas sektor terkait program kesehatan di masyarakat	
8	Keterbatasan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya	1) Belum semua Fasilitas Kesehatan memiliki sarana prasarana, alat kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan penunjang lainnya (obat, vaksin, alat pcr,	Keterbatasan anggaran kesehatan yang dialokasikan belum mencukupi dan memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas	Penguatan Sistem Kesehatan

	manusia, pembiayaan, teknologi informasi kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, dan penunjang layanan lainnya.	dll) yang memenuhi standar		
		2) Kurangnya jumlah Sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan, serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas, sehingga menyebabkan pemberian layanan kesehatan kurang optimal	Adanya moratorium penerimaan PNS dan tenaga harian lepas oleh pemerintah dan belum dipenuhinya formasi sesuai dengan rencana kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah yang telah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Sedangkan jumlah tenaga yang pensiun dan mutasi terus bertambah	
9	Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya yang terkait dengan pembiayaan kesehatan	Belum semua penduduk Kota Pontianak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) baik mandiri maupun penerima bantuan sehingga sistem pembayaran masih cenderung tidak efektif dan masih dibayarkan mandiri oleh masyarakat secara langsung, sehingga banyak masyarakat kurang mampu tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai	Belum semua masyarakat tidak mampu tercover menjadi peserta penerima bantuan iuran baik APBN maupun APBD disebabkan karena keterbatasan anggaran, masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang jaminan kesehatan nasional (JKN) dan manfaatnya, disisi lain masih ada masyarakat menganggap biaya iuran bulanan terlalu tinggi serta beberapa pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta BPJS	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2023

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Tabel. 2.5, dapat dilihat perbandingan rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan catatan penting terkait hasil analisis kebutuhan di Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel.2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan	Lok	Indikator Program / Kegiatan	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	100	%	87.558.221.202,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi		%	87.558.221.202,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pontianak	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	%	30.191.780.538,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pontianak	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	%	30.191.780.538,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	%				Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	57.025.831.272,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	57.025.831.272,00

		2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%				2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%	
		3)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%				3)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	
		4)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%				4)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	
		5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		6)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				6)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		7)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%				7)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	

		8)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				8)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%				9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%				11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		13)Persentase penanggulangan KLB yang	100	%				13)Persentase penanggulangan KLB yang	100	%	

		direspons < 24 jam						direspons < 24 jam			
		14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan	100	%				14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan	100	%	
		15) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%				15) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	
		15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%				15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	
		16) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	60	%				16) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	60	%	
		16) Persentase Fasyankes yang melaksanakan kesehatan kerja	60	%				16) Persentase Fasyankes yang melaksanakan kesehatan kerja	60	%	
		17) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	65	%				17) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	65	%	
		18) Persentase Cluster Germas yang dilaksanakan	65	%				18) Persentase Cluster Germas yang dilaksanakan	65	%	

		20)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%				20)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%	
		21)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%				21)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		23)Persentase jemaah calon haji yang dilakukan deteksi faktor resiko kesehatan	100	%				23)Persentase jemaah calon haji yang dilakukan deteksi faktor resiko kesehatan	100	%	
		24) Persentase Layanan Rujukan dan Tim Kesehan PSC 119	100	%				24) Persentase Layanan Rujukan dan Tim Kesehan PSC 119	100	%	
		25)Persentase penderita Penyakit Menular yang ditangani sesuai standar	100	%				25)Persentase penderita Penyakit Menular yang ditangani sesuai standar	100	%	
		25)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	70	%				25)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	70	%	
		26)Persentase masyarakat tidak	100	%				26)Persentase masyarakat tidak	100	%	

		mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan						mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan			
		30) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2	per 1000 Penduduk				30) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2	per 1000 Penduduk	
		35)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	92	%				35)Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	92	%	
		37)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%				37)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	205.530.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	205.530.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100	%	135.079.392,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100	%	135.079.392,00
Program Peningkatan Kapasitas		Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	100	per 1.000 Penduduk	1.450.425.700,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber		Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	100	per 1.000 Penduduk	1.450.425.700,00

Sumber Daya Manusia Kesehatan						Daya Manusia Kesehatan					
		Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	100	%				Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	100	%	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		Persentase Berita Acara dan Rekomendasi yang dikeluarkan	100	%	0,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota		Persentase Berita Acara dan Rekomendasi yang dikeluarkan	100	%	0,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	20.754.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	20.754.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	1.429.671.700,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	%	1.429.671.700,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM	100	%	440.627.440,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM	100	%	440.627.440,00

		(Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum)sesuai standar						(Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum)sesuai standar			
Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	100	%	58.561.110,00	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	100	%	58.561.110,00
Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	%	0	Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	%	0
		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Perbekalan	100	%				Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Perbekalan	100	%	

		Kesehatan Rumah Tangga						Kesehatan Rumah Tangga			
Penerbitan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan mendapatkan pengawasan	100	%	143.614.860,00	Penerbitan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan mendapatkan pengawasan	100	%	143.614.860,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ estoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	62	%	172.449.870,00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ estoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	62	%	172.449.870,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	62	%	58.641.600,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	62	%	58.641.600,00
Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Post		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	100	%	7.360.000,00	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Post		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	100	%	7.360.000,00

Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga				Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	100	%	1.002.115.500,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	100	%	1.002.115.500,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	1.002.115.500,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	%	1.002.115.500,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	%	164.721.550.878,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	%	164.721.550.878,00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	213.741.041,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	213.741.041,00
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	159.858.434.980,00	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	159.858.434.980,00
Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	88.635.000,00	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	Bulan	88.635.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	49.049.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	49.049.400,00
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	418.138.578,00	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	418.138.578,00
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik	12	Bulan	836.742.335,00	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik	12	Bulan	836.742.335,00

		daerah pada perangkat daerah						daerah pada perangkat daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	2.098.297.560,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	2.098.297.560,00
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	Unit	1.158.511.984,00	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	Unit	1.158.511.984,00
Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100	%	114.000.000.000,0 0	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100	%	114.000.000.000,0 0
Jumlah					395.696.097.000,0 0						395.696.097.000,0 0

Sumber : Dinas Kesehatan , 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2020 – 2024, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 2.6, sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (%)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	95	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	97	
			Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	97	
			Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	95	
			Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100	

	1.1)Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100	Usulan ASMAS 4 (empat) Posyandu Rehabilitasi dan Pembangunan baru
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	
	1.2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1)Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kesehatan	100% (utama/paripurna = 6 puskesmas)	
			2)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
			3)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	
			4)Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
			5)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	
			6)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			7)Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			8)Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	100	

			mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
			9)Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			10)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			11)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	
			12)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	
			13)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	
			14)Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	100	
			15)Persentase jemaah calon haji yang terdeteksi faktor resiko kesehatan	100	
			16)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam	100	
			17)Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2 per 1000 Penduduk	
			18)Persentase RS rujukan tingkat	100	

			Kab/Kota yang terakreditasi		
			19)Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100	
			20)Persentase pemeriksaan croscek slide TBC	100	
	1.3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	80	
	1.4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100	
			Penyediaan Biaya Operasional RS	100	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 Per 1.000 Penduduk	
			Persentase Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90	
	1.1)Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	
	1.2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase pelaksanaan UKOM bagi tenkes	100	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Pontianak	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90	
	1.1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85	
	1.2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang memiliki izin operasional	100	
	1.3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional	100	
			Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100	
	1.4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa		Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	85	

	Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
	1.5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Pontianak	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90	
	1.1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100	
	PROGRAM RUTIN				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80	
	1.1)Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	
	1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi keuangan perangkat daerah	12	
	1.3)Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	

1.4)Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	12	
1.5)Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	
1.6)Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	
1.7)Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48	
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6	

Sumber : Dinas Kesehatan,2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional merupakan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan yang menjadi tolak ukur target pencapaian kinerja kesehatan di Kota Pontianak. Adapun isu kesehatan yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan di Tahun 2022 adalah Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Pencegahan Stunting, Peningkatan Pengendalian Penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan *health security* untuk penanganan pandemi, Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), serta Peningkatan sistem kesehatan nasional.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan. Visi Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah ***“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”***. Sedangkan Misi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Menurunkan angka stunting pada balita.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam menetapkan indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program, dan menjadi acuan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kesehatan. Perencanaan tahunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan yang sudah disusun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru, dan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 050/10/Bappeda/Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah berjalan bersamaan dan simultan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan bahwa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan), Tahun 2024-2026. Oleh karenanya berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, ditetapkan Tujuan Pembangunan Kesehatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Kesehatan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 serta Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak, maka ditetapkan Indikator Sasaran Kota Pontianak dan merupakan Tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 yakni **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Dengan indikator tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Angka Stunting Balita”**

B. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam kurun waktu (3) tiga tahun adalah **“Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat”**. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
3. Persentase Penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
4. Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Hipertensi sesuai standar
5. Persentase Wasting Balita
6. Fasyankes Pemerintah yang Terakreditasi

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan, Sasaran beserta Indikator Perubahan RENSTRA
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Tujuan						
1	Angka Harapan Hidup	72,82	Tahun	73,65	73,74	73,9	73,54
	Angka Stunting Balita	17%	%	14,00	13,00	12,00	14%
B	Sasaran						
1	Angka Kematian Ibu	49,66	per 100,000 KH	166.84	158.06	149.28	47,5
2	Angka Kematian Bayi	2,48	per 1,000 KH	2.11	2.02	1.93	2
3	Persentase Penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	100.00	100.00	100.00	100
4	Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelauanan Hipertensi sesuai Standar	32,8	%	100.00	100.00	100.00	25
5	Persentase Wasting Balita	21,54	%	7.00	6.90	6.80	7
6	Fasyankes Pemerintah yang Terakreditasi	100	%	100.00	100.00	100.00	100

Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2024 - 2026

3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali kota, maka indikator tujuan yang dipilih sesuai dengan indikator sasaran dari RPJMD dan RPD Kota Pontianak Bidang Kesehatan, yaitu berupaya meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Pontianak.
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah pertimbangan dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota

Pontianak, yang juga merupakan salah satu penentu keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, dimana Dinas Kesehatan berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, terdiri atas : (Berdasarkan PMK No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Berikut 12 Indikator beserta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, yaitu :

Tabel. 3.2
Jenis Pelayanan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Satuan	Target Capaian setiap tahun			
				2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	%	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Persentase Orang dengan risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 , 2019

- c. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan tingkat Kota Pontianak. Dinas Kesehatan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan, yang berada pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat telah menjamin penduduk miskin di Kota Pontianak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui Skema Bantuan untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Program ini dimaksudkan dalam rangka menguatkan kebijakan penguatan pembiayaan Kesehatan dan Penguatan Layanan Primer di FKTP Pemerintah dan Swasta.
- d. Mendukung Peningkatan Inovasi Pengendalian Vektor, Sanitasi Total berbasis masyarakat dan Penguatan Tata laksana penanganan Penyakit dan Cedera
- e. Mendukung penguatan Perencanaan dan Penganggaran ATM di Kota Pontianak dengan mengintergrasikan Nomenklatur Sub Kegiatan dalam Penanganan AIDS/HIV, Tuberkulosis dan Malaria sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 119/7099/SJ tanggal 8 Desember 2021 antara Kemendagri dan Asosiasi Dinas Kesehatan se-Indonesia tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran ATM di Daerah, dan Surat Kemendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022, termasuk di Kota Pontianak yang telah di laksanakan Pertemuan lokakarya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kota Pontianak terkait ADIS, Tuberkulosis, dan malaria tanggal 16-17 Maret 2023, menyepakati penguatan Perencanaan ATM dalam Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- f. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat.
- g. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.
- h. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit di Daerah Kota Pontianak.
- i. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan, Distribusi dan Mutu Tenaga Kesehatan
- j. Peningkatkan cakupan dan Kualitas Pelayanan Antenatal dan Postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan diatas, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024, baik dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, maupun Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkati DAK Tahun Anggaran 2022,

DBH-CR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkesdirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan memiliki 4 (empat) program wajib dengan 14 (empat belas) kegiatan, 1 (satu) program rutin dengan 9 (sembilan) kegiatan, serta jumlah sub kegiatan keseluruhan adalah 100 (Seratus) Sub Kegiatan.

Berikut Tabel. Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu : (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Tabel. 3.3
Nama Program, Kegiatan, dan Sub.Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan
1	2	3	4
1)Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1	Pembangunan Puskesmas
		2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		3	Pengembangan Rumah Sakit
		4	Pengembangan Puskesmas
		5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
		6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		8	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		9	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		10	Pengadaan Obat, Vaksin
		11	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		12	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
		13	Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan medis habis pakai (BMHP), Makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya

	2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana
		28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		31	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		32	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		34	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
		35	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		36	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		37	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

		38	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		39	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Pontura & SSMA)
		40	Operasional Pelayanan Puskesmas (APBD+DAK)
		41	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota
		42	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
		44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
		45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
		46	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
	3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	47	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		48	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		49	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet
	4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
		51	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		52	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		53	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
2)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	54	Pengendalian dan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		55	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	56	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		59	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		60	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	61	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		62	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh	63	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

	industri rumah tangga		
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) anantara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ estoran dan Depot Air Minum (DAM)	64	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air minum
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	65	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan
	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	66	Pemeriksaan Post market pada Produk makanan minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
		67	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga
4)Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
5)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		70	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		71	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		73	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

		74	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		75	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		76	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		77	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		80	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		81	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	82	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		83	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		84	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		85	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		86	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		87	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		88	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		90	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		91	Pengadaan Mebel
		92	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		94	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		96	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		97	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		98	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		99	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	100	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber : Surat Kemdagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 (hal 236) dan Renstra Dinkes Tahun 2024-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

4.1 Rencana Kerja

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi dan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak menetapkan Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 beserta indikator dan target sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pontianak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS KESEHATAN			270.686.270.420					323.847.610.928
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.365.660.420					322.481.383.428
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			270.365.660.420					322.481.383.428
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		278.721.550.878				95 %	255.163.383.907
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		10 Dokumen	213.741.041		-	10 Dokumen	238.477.409
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.852.210	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Dokumen	84.964.700
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan		4 Laporan	0	-	-	4 Laporan	10.681.100

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	79.888.831	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Laporan	142.831.609
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	159.858.434.980		-	12 Bulan	164.297.577.281
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1087 Orang/bulan	158.532.421.000	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1087 Orang/bulan	156.905.405.000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	1.158.552.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	24 Dokumen	7.033.115.247

										UMUM			
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		36 Dokumen	167.461.980	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	305.012.934
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	0	-	-	1 Laporan	14.162.500
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	0	-	-	1 Dokumen	6.401.450
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	0	-	-	4 Laporan	33.480.150
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		12 Bulan	88.635.000		-	12 Bulan	161.707.425
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	88.635.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	161.707.425
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	49.049.400		-	12 Bulan	664.237.627
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	49.049.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	276.700.127
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		6 Dokumen	0	-	-	2 Dokumen	70.812.500

1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		31 Orang	0	-	-	105 Orang	316.725.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	418.138.578		-	12 Bulan	2.113.156.960
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		24 Paket	13.478.572	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Paket	135.919.535
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36 Paket	177.682.624	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16 Paket	1.150.751.476
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		36 Paket	25.256.182	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Paket	47.692.091
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	50.628.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	17 Paket	285.319.100
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	28.322.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11 Paket	144.223.017
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		36 Dokumen	1.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	2.492.600
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	121.450.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15 Laporan	346.759.141

1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	836.742.335		-	12 Bulan	1.655.975.922
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	-	-	6 Unit	679.800.000
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	450.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	-
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 Unit	0	-	-	55 Unit	245.877.480
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pagu Pengadaan Alat Perangkat SI : Rp.205,530,000)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	592.272.335	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	60 Unit	730.298.442
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.098.297.560		-	12 Bulan	10.469.666.746
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	229.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Laporan	2.631.530.000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.868.497.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Laporan	7.838.136.746
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	48 Unit	1.158.511.984		-	48 Unit	3.243.709.537
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	320.610.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	40 Unit	1.366.227.500

					Dinas Jabatan								
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	0	-	-	40 Unit	131.840.000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	43.203.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	145 Unit	283.250.000	
1	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	99.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Unit	186.945.000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	695.698.384	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Unit	1.275.447.037	
1	02	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		0	-	-	0 Ha	-	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100 %	114.000.000.000		-	100 %	72.318.875.000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja	114.000.000.000	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1 Unit Kerja	72.318.875.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi	100 %	115.471.964.924			100 % 100 Persen	149.123.831.031	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang	1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	35.017.044.343		-	1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	40.024.400.000	

					Kabupaten/Kota	memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar							
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	12.000.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	5.000.000.000	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	882.282.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Unit	669.500.000	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	5.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Unit	-	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	634.142.198	DANA INSENTIF DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-	-	1 Unit	-	

										DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		105 Unit	0	-	-	30 Unit	7.500.000.000
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		6 Unit	649.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2 Unit	5.000.000.000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		6 Unit	0	-	-	2 Unit	669.500.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		255 Unit	10.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	80 Unit	3.000.000.000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		25 Unit	0	-	-	125 Unit	77.250.000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		6 Paket	2.423.332.525	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA	-	2 Paket	11.100.000.000

										TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD SSMA)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		6 Paket	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	-
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		6 Paket	1.880.794.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	6.900.000.000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	47.053.620	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Unit	41.200.000
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		72 Paket	0	-	-	24 Paket	66.950.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan; etc		1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	79.418.287.209		-	1) 100; 2) 100 1)%; 2)%	107.638.142.257
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11.524 Orang	145.343.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	11,506 Orang	5.085.651.208

										BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11.002 Orang	3.389.958.320	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	10,984 Orang	3.751.958.738
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.477 Orang	472.715.000	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	10,461 Orang	2.973.432.949
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		50.378 Orang	205.390.000	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	50,252 Orang	6.766.990.782

										UMUM			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		88.897 Orang	57.771.520	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	89,041 Orang	3.036.031.537
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		574.165 Orang	182.925.600	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	562,876 Orang	1.552.559.790
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		81.199 Orang	94.871.520	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	73,992 Orang	7.143.257.106
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		172.197 Orang	6.864.600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	168,845 Orang	25.155.271
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		14.166 Orang	635.307.280	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-	-	13,890 Orang	16.484.233

										PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1.465 Orang	117.325.885	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PELAYANAN KESEHATAN	-	1,436 Orang	11.057.934
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		12.495 Orang	377.527.200	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	11139 Orang	741.638.857
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		15.476 Orang	232.161.780	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-	-	16,327 Orang	757.204.521

										PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12 Dokumen	0	-	-	12 Dokumen	15.473.562
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		12 Dokumen	0	-	-	12 Dokumen	2.000.000.000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen	2.622.311.100	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1 Dokumen	810.993.865
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	197.486.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN	-	2 Dokumen	146.320.356

										BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	803.687.105	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	12 Dokumen	900.795.390
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		3 Dokumen	130.147.130	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	3 Dokumen	62.315.000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	10.300.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER	-	12 Dokumen	11.590.590

										UMUM-DANA BAGI HASIL			
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		131.232 Orang	7.505.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	115781 Orang	3.290.232
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Pagu 7.505.280 gabung ke Upaya Krisis)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen		Sub Keg di Hapus	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2 Dokumen	36.978.309
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Peng Upaya Kes Khusus gabung di sub keg ini)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen		1.021.099.260	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	412.000.000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen		1.437.112.200	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	24 Dokumen	24.460.025

1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	29.968.602.250	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PEMBAYARAN IURAN JKN	-	12 Dokumen	33.654.156.000
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1 Unit	0	-	-	1 Unit	50.985.000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Pontura/Dinkes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1 Dokumen	7.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	7.500.000.000
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD SSMA)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1 Dokumen	10.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	10.000.000.000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (DAU & BOK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	18.904.798.099	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	24 Dokumen	18.904.798.099
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		7 Unit	280.490.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	12 Unit	516.812.718

1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen	0	-	-	24 Dokumen	662.750.185
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,661 Orang	211.105.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2504 Orang	11.000.000
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang	336.080.890	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	95 Orang	11.000.000
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11,496 Orang	27.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	11.496 Orang	8.000.000
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	42.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Tatanan	33.000.000

1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	406.992.980		-	100 %	1.255.288.774
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		13 Dokumen	Sub Keg Di Hapus Pusat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Dokumen	301.116.710
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUD SSMA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		13 Dokumen	9.826.580	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	-
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Pagu Gabungan dari Pengelolaan data dan Inform Kes : Rp.154,172,400 + 37,464,000)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		13 Dokumen	191.636.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	13 Dokumen	727.572.064
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Pagu Pindah ke Pengadaan Peralatan Mesin lainnya : 205,530,000)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		30 Unit	Sub Keg di Hapus Pusat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	10 Unit	226.600.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan			629.640.392		-	100 %	206.000.000
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		14 Unit	61.217.340	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	14 Unit	61.800.000

1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		14 Unit	0	-	-	14 Unit	61.800.000
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		25 Unit	568.423.052	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	25 Unit	41.200.000
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		2 Dokumen	0	-	-	2 Dokumen	41.200.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1) Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan per 1.000 penduduk, 2)Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar		1) 2,3; 2) 90 1) per 1.000 penduduk; 2) %	80.754.000			1) 2,3; 2) 90 1) per 1.000 penduduk; 2) %	214.676.051
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan			0		-	100 %	82.400.000
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		4 Dokumen	0	-	-	4 Dokumen	41.200.000
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak		4 Dokumen	0	-	-	4 Dokumen	41.200.000

					Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM			20.754.000		-	100 %	39.133.820
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	20.754.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	39.133.820
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100 %	60.000.000		-	100 %	93.142.231
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		5 Orang	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Orang	93.142.231
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar		80 %	781.123.440			80 Persen	843.795.011
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat		100 %	126.668.110		-	100 %	175.250.000

1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		75 Dokumen	0	-	-	75 Dokumen	98.000.000
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50 Sarana	126.668.110	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	50 Sarana	25.750.000
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		50 Sarana	0	-	-	50 Sarana	51.500.000
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase pemberian sertifikat terhadap IPKRT yang habis masa izinnya			0	-	-	100 %	227.630.000
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		5 Dokumen	0	-	-	5 Dokumen	221.450.000

1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		5 Dokumen	0	-	-	5 Dokumen	6.180.000
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu		100 %	155.705.000		-	100 %	125.000.000
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		300 Dokumen	155.705.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	300 Dokumen	125.000.000
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat			172.449.870		-	62 %	195.487.411

1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		4 Dokumen	172.449.870	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Dokumen	195.487.411
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		80 %	58.641.600		-	62 %	47.297.600
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		12 Dokumen	58.641.600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	100 Dokumen	47.297.600
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga			267.658.860		-	100 %	73.130.000
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		28 Unit	267.658.860	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	28 Unit	52.530.000

1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		60 Dokumen	0	-	-	60 Dokumen	20.600.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina		90 %	640.703.758			90 Persen	820.800.000
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan		100 %	640.703.758		-	100 %	820.800.000
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		6 Dokumen	640.703.758	endapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan, dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik, dana transfer umum-dana alokasi umum	-	6 Dokumen	820.800.000
					Jumlah				395.696.097.000				406.166.486.000

Berdasarkan Surat Edaran Wali kota Pontianak Nomor 050 / 10 / Bappeda / 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka ditetapkan pagu tentative pada rancangan awal Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. **395.696.097.000,-**

4.2 Pendanaan

Pendanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 merupakan penetapan pagu indikatif yang sesuai dengan pagu anggaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Pengelompokan Pendanaan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Wali kota Pontianak Nomor 050 / 10 / Bappeda / 2023 tanggal 17 Februari 2023, bahwa Dinas Kesehatan diberikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 31,048,723,000. Adapun untuk kegiatan prioritas Operasional Rumah Sakit Pontianak Utara dialokasikan sebesar Rp. 7,500,000,000,- dari Dana Alokasi Umum. Bantuan untuk Iuran PBI juga diperoleh selain dari DBH Pajak Rokok sebesar 75% nya, juga dari bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 2,081,000,000,-

BAB V
PENUTUP

1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh ASN yang ada di Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan.
2. Dalam rangka mencapai tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*”, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai efektif dan efisien, dan serta berpatokan untuk dapat menguntungkan seluruh masyarakat pro rakyat di Kota Pontianak.
3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan selalu melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya pada capaian kinerja dan anggaran pada akhir tahun.

Pontianak, Agustus 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak,



dr. Santiko, M.Med.PH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19661113 199603 1 003



JL. Jend. Achmad Yani, Telp. (0561) 760528 Fax. 732602. Pontianak 78112
Website: <http://dinkes.pontianak.go.id>, E-mail : dinkes@pontianak.go.id
2023